

**Pengukuran Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Salsabila Fakhira¹, Zaenal Muttaqin²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
salsabila20022@mail.unpad.ac.id, zaenal.muttaqin@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by indications of problems related to a significant increase in budget realization from 2021 to 2022 in three activities. This research aims to measure budget performance based on the concept of value for money in the Management Agency Regional Finance (BPKD) of DKI Jakarta Province, using Mahmudi's theory in 2019. The research method used is descriptive qualitative using primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The determination of informants is adjusted to research needs which include the budget sector, treasury sector, program and finance sub-sections, as well as the coaching sector. To ensure the validity of the data, source triangulation and technical triangulation were used. The results of this research recommend the need for planning activities that are in accordance with priorities and budget allocation that is right on target, and in accordance with the achievement of indicators. This aims to improve budget performance so that it becomes more economical, efficient and effective.

Keywords: *Value for money; Budget Performance; Regional Financial Management*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh indikasi masalah terkait adanya peningkatan realisasi anggaran atau penggunaan anggaran yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022 pada tiga kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja anggaran yang didasarkan pada konsep *value for money* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan teori Mahmudi tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penentuan informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang mencakup bidang anggaran, bidang perbendaharaan, sub-bagian program dan keuangan, serta bidang pembinaan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta sesuai dengan pencapaian indikator. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggaran agar menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif.

Kata kunci: *Value for money; Kinerja Anggaran; Pengelolaan Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Anggaran memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2022 mengenai tujuan anggaran untuk

mengatur pengelolaan keuangan negara. Pentingnya anggaran dalam hal ini memerlukan sistem yang menjadi kerangka atau proses untuk memastikan bahwa penggunaan dana berlangsung secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut (Ihwan & Rahman, 2016) penyusunan anggaran selalu ada keterkaitan antara alokasi sumber daya dan pencapaian hasil yang diinginkan, yang kemudian direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target kinerja oleh setiap unit kerja.

Anggaran diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk pengukuran kinerja pada sektor publik. Menurut (Trilestari, 2005) upaya untuk pengukuran kinerja melibatkan integrasi pengukuran kinerja dengan sistem anggaran. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Tujuannya adalah agar instansi-instansi bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya. Kinerja merupakan faktor kunci dalam suatu organisasi sebagai gambaran tingkat pencapaian atas pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, termasuk organisasi publik (Lubis, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 menjelaskan bahwa kinerja pada sektor publik adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai tingkat akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat melalui kemampuan instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang dilaksanakan dalam perencanaan strategis (Permana & Riharjo, 2017). Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi sektor publik, yang ditujukan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program-program kegiatan. Hal ini diperlukan untuk menilai sejauh mana organisasi memberikan pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran.

Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa badan memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam hal keuangan pemerintahan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas mengelola keuangan daerah serta berperan dalam urusan keuangan pemerintahan. BPKD DKI Jakarta, dalam Pelaksanaan pengelolaan anggaran, selalu memberikan perhatian terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan sasaran strategis BPKD DKI Jakarta, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dalam capaian kinerjanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2021-2022, terdapat tiga program dan kegiatan pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang secara khusus mendukung setiap program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Data di bawah merupakan total capaian realisasi anggaran yang berasal dari tiga program yang dicapai pada tahun anggaran 2021 dan 2022, sebagai berikut :

**Tabel 1. Total Capaian Anggaran dari Ketiga Program
 BPKD DKI Jakarta Tahun 2021 & 2022**

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2021	245,619,286,874	190,890,101,308	77,72%
2022	179,059,386,388	172,700,840,491	96,45%

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan tabel 1 terlihat pada tahun 2021 pagu anggaran sebesar 245.619.286.874, dan pada tahun 2022 sebesar 179.059.386.388. Akan tetapi, untuk realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 18.73%. Pada tahun 2021, realisasi anggaran adalah sebesar 190.890.101.308 dengan persentase 77.72% dari pagu anggaran. Akan tetapi, pada tahun 2022, realisasi anggaran meningkat menjadi sebesar 172.700.840.491 dengan persentase 96.45% dari pagu anggaran, hal ini menjelaskan adanya peningkatan yang cukup tinggi dalam hal realisasi anggaran program pengelolaan keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Berikut merupakan total pagu dan capaian anggaran pada provinsi lain yang menjadi pembanding untuk melihat kisaran besaran realisasi program, yaitu BPKAD Provinsi Jawa Timur dan BPKAD Provinsi Banten, yang berasal dari tiga program pendukung selama periode 2021 dan 2022, sebagai berikut :

**Tabel 2. Total Capaian Anggaran dari Ketiga Program
 BPKD Provinsi Banten Tahun 2021 & 2022**

BPKAD Provinsi Banten			
Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2021	3,600,017,817,863	3,483,606,397,294	96,77%
2022	3,355,783,084,254	3,275,974,430,360	97,62%

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat BPKAD Provinsi Banten, melalui mekanisme Perubahan APBD pada tahun 2021, mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp3.600.017.817.863,00 dengan realisasi sebesar Rp3.483.606.397.294,00 atau sebesar 96,77%. Pada tahun 2022, alokasi anggaran

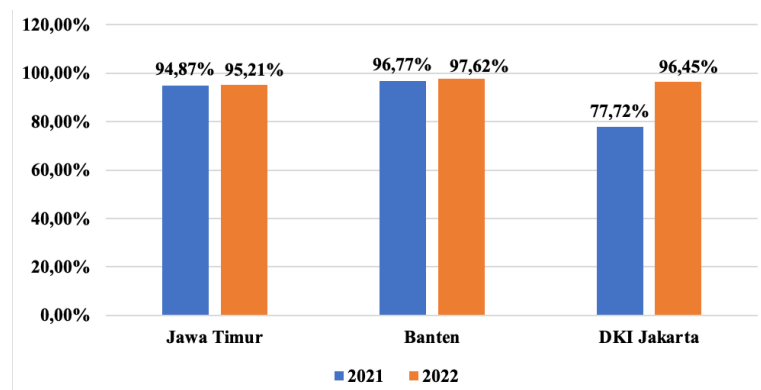
Belanjanya mencapai Rp3.355.783.084.254,00 dengan realisasi sebesar Rp3.275.974.430.360,00 atau sekitar 97,62%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran tahun 2021 untuk ketiga program tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,85% di tahun 2022.

Tabel 3. Total Capaian Anggaran dari Ketiga Program BPKD Provinsi Banten Tahun 2021 & 2022

BPKAD Provinsi Jawa Timur			
Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2021	100,091,114,234	94,953,029,267	94,87%
2022	114,942,529,234	109,476,893,635	95,21%

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp100.091.114.234,00. Dari alokasi tersebut, terealisasi sebesar Rp94.953.029.267,00 atau sekitar 94,87%. Sementara itu, untuk tahun 2022, alokasi anggarannya mencapai Rp114.942.529.234,00 dengan realisasi sebesar Rp109.442.362.793,00 atau sekitar 95,21%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk ketiga program tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,34% di tahun 2022.



Gambar 1. Perbandingan Realisasi Anggaran Provinsi Lain dari Ketiga Program BPKD (%)

Sumber : Data Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar 18,73% di tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPKD DKI Jakarta merupakan provinsi dengan peningkatan realisasi anggaran yang cukup tinggi antara provinsi lain ditahun 2021 dan 2022. Berikut ini adalah data realisasi anggaran pada salah satu program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2021 dan 2022 :

Tabel 4. Realisasi Anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 dan 2022

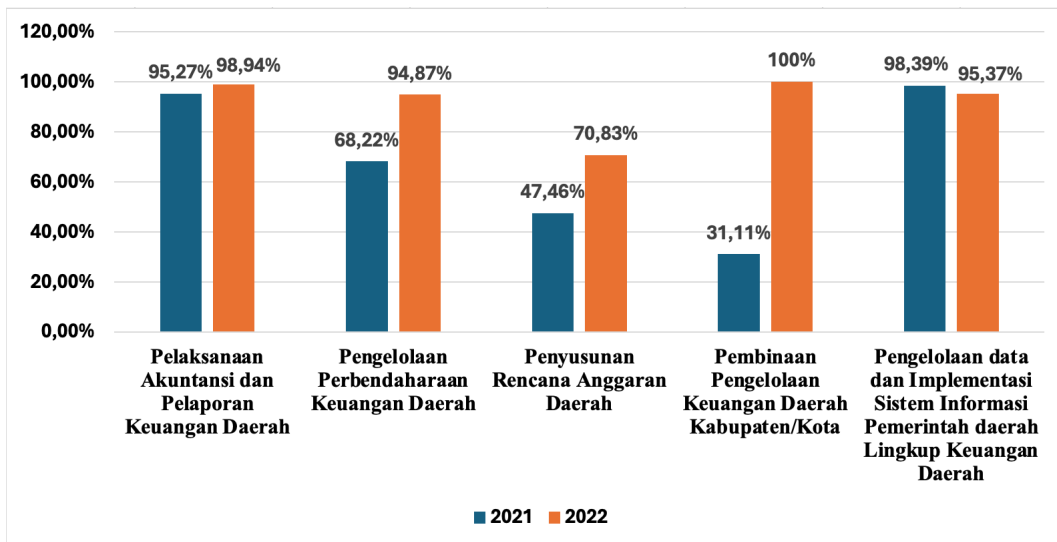
Nama Kegiatan	2021		%	2022		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	386.257.035	367.985.440	95,27 %	392.246.354	388.090.622	98,94 %
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah	518.808.400	353.916.000	68,22 %	615.808.440	584.201.600	94,87 %
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	836.524.947	416.037.020	47,46 %	766.076.361	542.579.730	70,83 %
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	166.500.000	51.800.000	31,11 %	164.700.000	164.700.000	100 %
Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	11.592.792.015	11.405.917.661	98,39 %	12.976.796.205	12.376.595.600	95,37 %
	Rata-rata 2021		68,54 %	Rata-rata 2022		92%

daerah Lingkup Keuangan Daerah				
-----------------------------------------	--	--	--	--

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta 2021 dan 2022).

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat pada tahun 2021, rata-rata realisasi pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 68,54%. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dengan rata-rata mencapai 92%. Pada kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat tiga kegiatan dengan total realisasi yang dapat dikategorikan rendah pada tahun 2021. Pertama, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan realisasi sebesar 68,22%, Kedua kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan realisasi sebesar 47,46%, dan Ketiga kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 31,11%.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada kegiatan yang sama terhadap total realisasi kegiatan tersebut. Pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah mengalami peningkatan sebesar 26,65% dengan realisasi mencapai 94,87%. Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah mengalami kenaikan sebesar 23,36% dengan realisasi mencapai 70,83%. Terakhir pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 68,89% dengan realisasi sebesar 100%.



Gambar 2. Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021 & 2022 (%)

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan gambar 2 anggaran tahun 2021 yang memiliki tingkat realisasi anggaran dibawah tahun 2022. Pada tahun 2021, serapan anggaran sebesar

Rp245.619.286.874, khususnya pada beberapa kegiatan program pengelolaan keuangan daerah belum dapat mencapai target. Pada organisasi sektor publik, kinerja adalah gambaran suatu capaian dari program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kegiatan yang menjadi fokus utama penulis untuk dibahas. Pertama, kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai tugas, termasuk koordinasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan serta transfer lainnya. Selain itu, ada fokus pada kerja sama dengan lembaga keuangan dalam transaksi non tunai dan penyusunan laporan keuangan daerah, termasuk aliran kas dan pemungutan serta penyetoran perhitungan pihak ketiga. Pada tahun 2021, tingkat realisasi anggaran hanya mencapai 68,22% diduga karena beberapa alasan, seperti masih adanya beberapa kegiatan masih berlangsung, sehingga anggaran tidak tercapai sepenuhnya. Akan tetapi, realisasi anggaran mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 94,87%, menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam mengoptimalkan anggaran pengelolaan perbendaharaan daerah.

Kedua, Kegiatan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Kegiatan ini melibatkan penyusunan KUA dan PPAS, peraturan daerah terkait APBD, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, perubahan APBD, serta perencanaan anggaran pembiayaan. Pada tahun anggaran 2021, realisasi anggaran hanya mencapai 47,46% serta mengalami perubahan akibat efisiensi pencetakan dan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, Akan tetapi, pada tahun 2022, realisasi anggaran meningkat menjadi 70,83%.

Ketiga, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup sosialisasi regulasi terkait keuangan daerah dan memberikan asistensi dalam pengelolaan keuangan BLUD di kabupaten/kota. Pada tahun 2021, tingkat realisasi anggaran hanya mencapai 31,11%, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengurangan biaya konsumsi yang dilakukan sehingga ikut memengaruhi tingkat realisasi tersebut. Pada tahun 2022, kegiatan dan anggaran terealisasi hingga 100% dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran dan penyesuaian. Maka dari itu, dilakukan penyesuaian dalam memaksimalkan alokasi dana untuk mendukung rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membimbing, memberikan informasi, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Menurut (Ardila & Putri, 2015), dukungan manajemen pengelolaan keuangan dari BPKD yang dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu pertanggungjawaban dari kegiatan instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya dengan melakukan perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi *input*, *output*, *outcome*, *impact*

dan kemanfaatannya. Penilaian kinerja anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memperhatikan *value for money* dalam pelaksanaannya

Menurut (Mahmudi, 2019:83) pengukuran berbasis *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu *input-output-outcome*. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi sektor publik dapat mengukur tingkat Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas.

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini meliputi faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan anggaran pada ketiga kegiatan tersebut, serta bagaimana kinerja kegiatan mempengaruhi realisasi anggaran pada program pengelolaan keuangan daerah di BPKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022, dapat dilakukan pengukuran menggunakan metode *value for money* agar prinsip dan tujuan dari ketiga kegiatan program pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

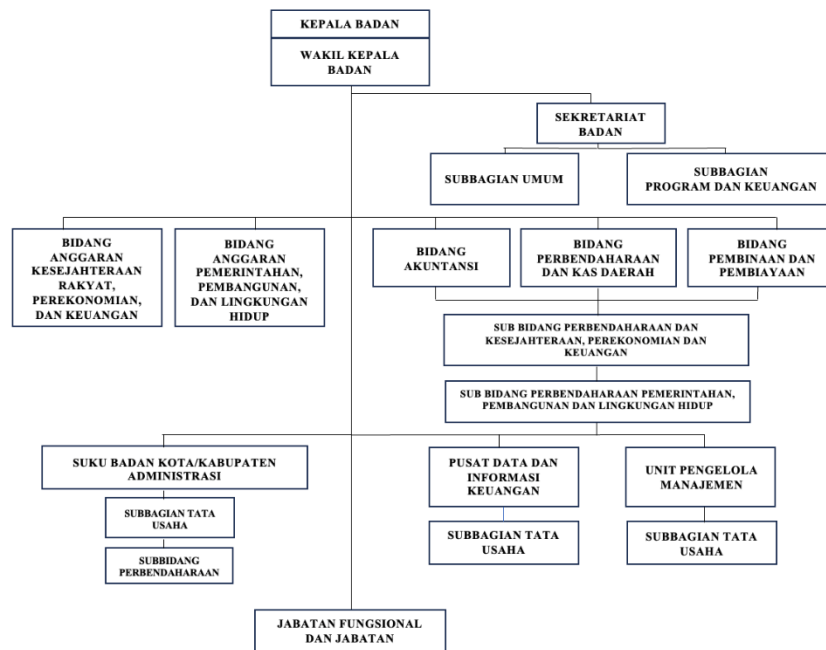
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang studi pengukuran kinerja anggaran kegiatan berbasis *value for money* pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, meneliti kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Badan ini merupakan unsur teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan tindak lanjut atas adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. BPKD DKI Jakarta bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan.

BPKD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah pada sub bidang pengelolaan keuangan. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPKD dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPKD

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja Anggaran dengan *Value for Money* pada Kegiatan Program Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta

Pada bagian ini merupakan hasil dan analisis mengenai kinerja anggaran pada ketiga kegiatan program pengelolaan keuangan daerah tahun 2021-2022. Data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis supaya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Penulis melakukan penelitian menggunakan teori dari (Mahmudi, 2019) untuk menganalisis kinerja anggaran pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota BPKD DKI Jakarta tahun 2021- 2022 dan juga menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Ekonomis

Menurut (Mahmudi, 2019) ekonomis adalah alat untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh

dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomis merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut. Semakin besar rasio persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 5. Kriteria Ekonomis

Persentase	Kriteria
> 100%	Ekonomis
85% - 100%	Cukup Ekonomis
65% - 84%	Kurang Ekonomis
65%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Suatu kegiatan dinilai sudah melakukan penghematan, jika sumber daya keuangan digunakan sebaik - baiknya dengan *input* yang minimal dalam pelaksanaannya. Pengukuran ekonomi membutuhkan data - data anggaran dan realisasinya untuk melakukan pencocokan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran kegiatan berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Dimensi ekonomis pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota merupakan analisis dari realisasi anggaran setiap kegiatan tahun 2021-2022. Secara matematis rumus ekonomis pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

$$Ekonomi = \frac{Input}{\text{Harga Input (Rp)}} \times 100\%$$

Keterangan

Input : Rencana Anggaran

Angka *input* yang dimaksud merupakan rencana anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

Harga *Input* : Realisasi Anggaran

Harga *input* yang dimaksud merupakan anggaran yang digunakan untuk memperoleh *input* pada rancangan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

Setelah mendapatkan nilai ekonomis dari rumus tersebut, maka digunakan tabel 5 klasifikasi pengukuran ekonomis di atas sebagai acuan pengukuran nilai ekonomis.

Pengukuran Ekonomis Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Analisis ekonomi yaitu mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran kegiatan ini memerlukan data rencana anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan realisasi anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dibagi, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga akan didapat nilai ekonomisnya. Berikut disajikan hasil dari perhitungan ekonomi pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah tahun 2021 - 2022. Berikut disajikan data anggaran dan realisasi dari masing-masing sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 6. Data Anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

SUB KEGIATAN	2021		2022	
	ANGGARAN N (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN N (Rp)	REALISASI (Rp)
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank 1 kali dalam periode 2021-2022	-	-	26.000.000	20.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8.400.000	8.400.000	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.220.000	36.190.000	87.220.000	64.820.000
Koordinasi, fasilitasi , Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengelolaan Dana	87.642.400	72.180.000	150.338.440	141.781.600

Perimbangan dan dana Transfer Lainnya.				
Penyusunan Petunjuk Teknis Adminitrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	162.000.00 0	35.600.000	190.250.00 0	196.100.00 0
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah kab/kota	-	-	162.000.00 0	161.500.00 0
TOTAL	518.808.40 0	353.916.00 0	615.808.44 0	584.201.60 0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat anggaran dan realisasi dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdapat peningkatan dari tahun 2021 - 2022. Lalu, apabila dilihat dari segi pagu anggaran, tahun 2022 mengalami peningkatan yang disebabkan adanya kebutuhan untuk penambahan pembahasan terkait rekonsiliasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, yaitu pengelolaan kas daerah dan peningkatan penerimaan dana bagi hasil. Hal ini disampaikan melalui wawancara bersama Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai informan 2.

Sementara itu, rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh prioritas kegiatan SKPD di bidang perbendaharaan, yang tidak selalu sejalan dengan prioritas daerah yang terdiri dari kegiatan prioritas SKPD, kegiatan prioritas daerah, dan kegiatan operasional. Kegiatan yang bukan menjadi prioritas utama daerah akan dialihkan dan dana yang telah disediakan akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih menjadi fokus utama. Kegiatan yang menjadi prioritas utama daerah pada saat itu, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah di bidang Kesehatan.

Tahun 2021, masih ada dampak dari pandemi COVID-19, sehingga anggaran APBD difokuskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah terutama dalam urusan Kesehatan dan tidak diutamakan untuk SKPD penunjang. Dana dialokasikan sesuai dengan prioritas. Hal ini disampaikan melalui wawancara bersama Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai informan 2.

Peningkatan realisasi anggaran tahun 2022 disebabkan, adanya penambahan aktivitas pada salah satu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Penambahan aktivitas tersebut meliputi pembahasan pengelolaan keuangan daerah, yang penting untuk memastikan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah berjalan dengan baik. Lalu peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang membutuhkan langkah tambahan guna memenuhi laporan kegiatan dengan baik. Semua ini tercermin dalam rencana penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, upaya kegiatan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran dan ketepatan dalam mengelola keuangan daerah serta memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Hasil Klasifikasi Pengukuran Ekonomi Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah

Persentase Nilai Ekonomi (%)	Tahun	
	2021	2022
	146,59%	105,41%
Keterangan	Ekonomis	Ekonomis

Sumber : Diolah penulis berdasarkan teori Mahmudi *Value for Money*

Berdasarkan tabel 7 dari hasil pengukuran tingkat ekonomis dan dimasukkan ke dalam klasifikasi pengukuran ekonomis menurut (Mahmudi, 2019). Tingkat ekonomis pada Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah tahun 2021 adalah sebesar 146,59% yang artinya Ekonomis. Rendahnya serapan anggaran pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan hemat, di mana anggaran APBD difokuskan pada kegiatan yang dianggap sebagai prioritas utama, terutama dalam sektor kesehatan. Menyadari adanya keterbatasan dana, pemerintah daerah mungkin mengurangi kegiatan yang dianggap tidak mendesak atau bukan prioritas utama. Keputusan untuk tidak mengeluarkan surat penyedia dana dapat menjadi salah satu tindakan yang diambil untuk membatasi pengeluaran pada kegiatan yang telah diprioritaskan.

Kondisi berubah pada tahun 2022 tetap dalam kriteria yang ekonomis, namun anggaran dan realisasinya meningkat, sehingga rasio ekonomis berkurang menjadi 105,41%. Hal tersebut dikarenakan anggaran dan realisasi setiap tahunnya berbeda – beda sesuai dengan anggaran yang didapat dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya tidak menentu.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mahmudi, bahwa *input* sebaiknya diperoleh dengan biaya yang lebih rendah (*spending less*), dengan tujuan menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak produktif. Artinya, dalam kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2021 dan 2022 telah memenuhi kriteria ekonomis, namun tahun 2021 dinilai lebih baik karena lebih hemat dalam menggunakan sumber daya (*input*).

Pengukuran Ekonomis Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Pengukuran ekonomis yaitu mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran kegiatan ini memerlukan data anggaran dan realisasi anggaran Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Kegiatan ini dibagi ke beberapa sub kegiatan, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga akan didapat nilai ekonomisnya. Berikut disajikan data anggaran dan realisasi dari masing-masing sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tahun 2021 - 2022.

Tabel 8. Data Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

SUB KEGIATAN	2021		2022	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	189.801.227	113.587.340	255.265.000	188.696.544
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Penyusunan Penetapan & Penyelesaian APBD TA)	176.085.334	137.781.160	281.899.661	259.112.210
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021 (Penyusunan Perubahan PERGUB Penjabaran & Penyusunan	266.638.386	142.068.520	208.211.700	81.970.966

APBD Perubahan TA)				
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	244.000.000	22.600.000	20.700.000	12.800.000
TOTAL	876.524.947	416.037.020	766.076.361	542.579.720

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel 8 dilihat dari pagu anggaran kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran, terdapat penurunan di tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian, dan Keuangan sebagai Informan 1.

Penurunan pagu anggaran di tahun 2022, didasarkan oleh sedikitnya serapan anggaran pada tahun 2021 karena adanya penghematan dalam proses percetakan, dan honorarium bagi narasumber disesuaikan dengan golongan masing-masing. Selain itu, pada tahun 2021, terdapat satu tahap dalam penyusunan RKUA yang tidak dilaksanakan, yaitu tahap Pembahasan/Rapat Komisi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan sebagai Informan 1.

Meskipun terjadi penurunan pada pagu anggaran, data dalam tabel 4.4 juga menunjukkan peningkatan realisasi anggaran pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pergeseran anggaran sebanyak 7 kali dalam satu tahun dapat diidentifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi kenaikan tersebut, serta seringnya kegiatan tatap muka (*offline*) dan perjalanan dinas. Selain itu, pada tahun 2022, Dewan terlibat dalam pembahasan seluruh tahapan RKUPPAS, tanpa ada tahapan yang terlewatkan. Hal ini menunjukkan keterlibatan penuh dalam penyusunan rencana anggaran, berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan ini dapat menjadi penyebab langsung dari peningkatan realisasi atau serapan anggaran, mencerminkan kesungguhan dalam mengelola dan memonitor pelaksanaan anggaran daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan sebagai Informan 1.

Tabel 9. Hasil Klasifikasi Pengukuran Ekonomi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Persentase Nilai Ekonomi (%)	Tahun	
	2021	2022
	210,68%	141,19%
Keterangan	Ekonomis	Ekonomis

Sumber : Diolah penulis berdasarkan teori Mahmudi *Value for Money*

Berdasarkan tabel 9 dari hasil pengukuran tingkat ekonomis dan dimasukkan ke dalam klasifikasi pengukuran ekonomis yang merujuk pada (Mahmudi, 2019). Tingkat ekonomis pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tahun

2021 adalah sebesar 210,68% yang artinya Ekonomis. Dibandingkan dengan tahun selanjutnya, persentase rasio ekonomis jauh menurun menjadi 141,19% namun masih dalam kriteria Ekonomis.

Rendahnya serapan anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh kebijakan penghematan yang diimplementasikan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dalam proses percetakan dokumen dan penyesuaian honorarium narasumber sesuai dengan golongan masing-masing. Selain itu, adanya ketidaklaksanaan satu tahapan dalam penyusunan RKUA pada tahun 2021, khususnya tahap Pembahasan/Rapat Komisi, juga menjadi faktor utama. Informasi ini diterangkan oleh Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan sebagai informan, yang menjelaskan bahwa pengurangan tahap Rapat Komisi oleh Dewan mengakibatkan tidak adanya penyerapan anggaran, karena langsung dari Bamus (Badan Musyawarah ke Banggar (Badan Anggaran). Akibatnya, dana yang tidak terpakai menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang kemudian disesuaikan saat terjadi perubahan anggaran.

Pada tahun 2022, banyaknya realisasi anggaran karena pembahasan Dewan terhadap RKUPPAS dan RAPBD yang sebelumnya tidak dilakukan pada tahun 2021. Selain itu, pergantian anggaran sebanyak 7 kali juga berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan serapan anggaran. Adanya kegiatan tatap muka yang terus berlanjut pada tahun 2022 turut memberikan dampak besar terhadap biaya, termasuk biaya cetak dokumen dan honorarium narasumber yang meningkat, sehingga ikut menyumbang pada peningkatan serapan anggaran secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja anggaran dari tahun 2021 hingga 2022 berhasil mencapai Tingkat Ekonomis sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh (Mahmudi, 2019) bahwa *input* sebaiknya diperoleh dengan biaya yang lebih rendah dari rencana (*spending less*), dengan tujuan menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak produktif. Meskipun pada tahun 2022 telah mencapai kriteria ekonomis, namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat serapannya cukup berbeda. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan tahun 2022 untuk kegiatan ini sedikit kurang dalam hal penghematan.

Pengukuran Ekonomis Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran ekonomis yaitu mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran kegiatan ini memerlukan data anggaran dan realisasi anggaran kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dibagi ke beberapa sub kegiatan, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga akan didapat nilai ekonomisnya. Berikut disajikan data anggaran dan realisasi dari masing-masing sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 – 2022.

Tabel 10. Data Anggaran Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB KEGIATAN	2021		2022	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	166.500.000	51.800.000	85.000.000	85.000.000
Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	-	24.300.000	24.300.000
TOTAL	166.500.000	51.800.000	109.300.000	109.300.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat dari sisi anggaran dari kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdapat penurunan dari tahun 2021 - 2022. Penurunan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran didasari rendahnya serapan pada tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, sebagai informan 4.

Rendahannya serapan anggaran tahun 2021 dikarenakan adanya beberapa kendala saat merealisasikan anggaran dan ketidaksesuaian honor narasumber yang telah ditentukan, serta aktivitas yang telah selesai sebelum tahun anggaran berakhir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, sebagai informan 4.

Lalu, apabila dilihat dari realisasi anggaran terdapat peningkatan dari tahun 2021 - 2022. Peningkatan realisasi tersebut dikarenakan kebutuhan narasumber dapat bervariasi setiap tahun, tergantung pada perubahan peraturan, seperti yang mungkin terjadi dengan adanya Pergub baru dari Kemendagri. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 4.

Peningkatan realisasi yang disebabkan oleh anggaran honor narasumber, yang ditambahkan oleh informan 4. Berdasarkan wawancara dengan Informan 4, anggaran tahun 2022 dapat terealisasi sepenuhnya karena pelaksanaan kegiatan ini melibatkan penambahan aktivitas seperti penyempurnaan peraturan, yang memerlukan biaya tambahan untuk narasumber. Selain itu, kemungkinan jumlah narasumber yang hadir lebih banyak dari yang direncanakan. Penggunaan anggaran tahun 2021 dan 2022 pada kegiatan ini diukur dalam tingkat ekonomis sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Klasifikasi Pengukuran Ekonomi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Nilai Ekonomi (%)	Tahun	
	2021	2022
	321%	100%
Klasifikasi	Ekonomis	Cukup Ekonomis

Sumber : Diolah penulis berdasarkan teori Mahmudi *Value for Money*

Berdasarkan tabel 11 dari hasil pengukuran tingkat ekonomis dan dimasukkan ke dalam klasifikasi pengukuran ekonomis yang merujuk pada (Mahmudi, 2019). Tingkat ekonomis pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 adalah sebesar 321% yang artinya Ekonomis. Rendahnya serapan anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh pembatasan pembayaran kepada narasumber oleh instansi terkait, seperti dalam kasus pembahasan hibah di mana narasumber tidak diizinkan menerima pembayaran dari instansinya sendiri, meskipun honorarium untuk narasumber telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu juga, aktivitas - aktivitas seperti pembahasan Pergub dan Perda yang sudah selesai, sebelum akhir tahun.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam serapan anggaran yang mengakibatkan rasio ekonomis menurun menjadi 100%, mencerminkan kriteria yang Cukup Ekonomis. Hal ini disebabkan oleh penentuan besaran anggaran per tahun yang didasarkan pada jumlah narasumber yang diperlukan, dengan mempertimbangkan eselon dan standar biaya honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan gubernur tentang standar biaya. Akibatnya, realisasi anggaran dapat menjadi lebih tinggi karena kemungkinan jumlah narasumber yang hadir melebihi perkiraan semula.

Pengukuran tahun 2021 berhasil mencapai Tingkat Ekonomis, sesuai dengan prinsip yang dipaparkan oleh (Mahmudi, 2019) bahwa *input* hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*), dengan tujuan menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak produktif. Namun, pada tahun 2022, pengukuran menunjukkan kriteria Cukup Ekonomis, dikarenakan tingkat serapannya cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan untuk kegiatan ini kurang efisien dalam melakukan penghematan.

Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2019) efisiensi adalah alat untuk mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output*. Pengukuran efisiensi memerlukan data capaian fisik setiap kegiatan (*Output*) dan persentase anggaran kegiatan (*Input*) dari tahun 2021 – 2022 kemudian dikalikan dengan 100%. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya dengan *input* tertentu (*spending well*). Untuk mendapatkan nilai efisiensi pada kegiatan – kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka digunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan

Output : Persentase Realisasi Fisik

Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Input : Persentase Realisasi anggaran

Angka *input* yang dimaksud adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun efisiensi adalah perbandingan antara *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Setelah didapatkan nilai dari perhitungan menggunakan rumus efisiensi, maka hasil dari perhitungan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Kriteria Efisien

Persentase	Kriteria
< 90%	Sangat Efisien
90% – 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
> 100%	Tidak Efisien

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Menurut (Mahmudi, 2019) untuk menilai pencapaian kinerja, kriteria efisiensi ditentukan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jika semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik.

Analisis Efisiensi Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pengukuran efisiensi kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilakukan dengan menghitung perbandingan persentase nilai dari data capaian fisik, yang merupakan laporan penyelesaian pengelolaan perbendaharaan daerah (*Output*), dan persentase keuangan kegiatan (*Input*) dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian dikalikan dengan 100%. *Output* dalam ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, sebagai informan 2.

Berikut disajikan data target dan realisasi data fisik dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang mencakup jumlah laporan dan dokumen penyelesaian pengelolaan perbendaharaan daerah tahun 2021 :

Tabel 13. Target dan Realisasi Jumlah Capaian Fisik Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tahun 2021

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2021		Hasil Fisik (%)
		TARGET	REALISASI	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank	Laporan Evaluasi Penyelenggara Fasilitas Pembayaran Pendapatan Daerah	1 Laporan	-	-
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran (Tutup Buku)	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	-	-	-
Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya.	Laporan Sosialisasi Kebijakan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Laporan peningkatan DBH Pajak	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Laporan Pendampingan dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	Keuangan Daerah			
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah kab/kota	Laporan Peningkatan Kapabilitas SKPD/UKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Output (%)				85,71%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa jumlah laporan yang telah ditargetkan sebanyak 7 laporan, namun pada realisasinya hanya tercapai 6 laporan. Salah satu sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama, dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021. Hal ini disampaikan melalui wawancara bersama informan 3.

Berikut disajikan data target dan realisasi data fisik dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang mencakup jumlah laporan dan dokumen penyelesaian pengelolaan perbendaharaan daerah tahun 2022

Tabel 14. Target dan Realisasi Jumlah Capaian Fisik Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tahun 2022.

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2022		Realisasi Fisik (%)
		TARGET	REALISASI	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank	Laporan Evaluasi Penyelenggara Fasilitas Pembayaran Pendapatan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran (Tutup Buku)	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya.	Laporan Sosialisasi Kebijakan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	-	-	-
	Laporan peningkatan DBH Pajak	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	Laporan Pendampingan dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah kab/kota	Laporan Peningkatan Kapabilitas SKPD/UKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
Output (%)				100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 14, terdapat kenaikan dalam realisasi fisik kegiatan perbendaharaan pada tahun 2022, di mana targetnya adalah 13 laporan dan realisasinya juga mencapai 13 laporan. Seluruhnya, atau 100%, terealisasi sesuai target.

Tabel 15. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)	Klasifikasi
2021	85,71	68,22	125,65	Tidak Efisien
2022	100	94,87	105,41	Tidak Efisien

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan teori Mahmudi *Value for Money*

Berdasarkan Tabel 15 dan hasil perhitungan tingkat efisiensi yang disesuaikan dengan klasifikasi pengukuran efisiensi yang telah ditentukan oleh Mahmudi (2019), dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi tahun 2021 sebesar 125,65% dan tahun 2022 sebesar 105,41% dinilai Tidak Efisien karena

persentasenya melebihi 100%. Tingkat efisiensi suatu kegiatan dilihat dari persentase perhitungannya, di mana semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerjanya.

Tingkat efisiensi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021, karena anggaran yang direncanakan tidak terserap secara optimal dalam menghasilkan *output*. Sementara itu, serapan anggaran tahun 2022 lebih tinggi dalam menghasilkan *ouput* dan dinilai lebih baik jika dibandingkan rasio efisiensi tahun 2021.

Analisis Efisiensi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Pengukuran efisiensi kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dilakukan dengan menghitung perbandingan persentase nilai dari data capaian fisik, yang merupakan dokumen penyelesaian penyusunan rencana anggaran daerah (*Output*), dan persentase keuangan kegiatan (*Input*) dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian dikalikan dengan 100%. *Output* dalam hal ini disampaikan Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan sebagai informan 1.

Berikut disajikan data target dan realisasi data fisik dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang mencakup jumlah laporan dan dokumen penyelesaian penyusunan rencana anggaran tahun 2021 :

Tabel 16. Rencana dan Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tahun 2021

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2021		Realisasi Fisik (%)
		TARGET	REALISASI	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS dan KUPA PPAS APBD Tahun Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Penetapan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Dokumen Penyelesaian APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERGUB Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Data Rencana Aksi Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia	100%	100%	100%
Output (%)				100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa dari empat dokumen penyusunan anggaran daerah yang direncanakan pada tahun 2021, ternyata tercapai realisasi sebanyak lima dokumen. Ini menunjukkan bahwa realisasi *output*-nya adalah 100%.

Berikut disajikan data target dan realisasi data fisik dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang mencakup jumlah laporan dan dokumen penyelesaian penyusunan rencana anggaran tahun 2022

Tabel 17. Rencana dan Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tahun 2022

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2021		Realisasi Fisik (%)
		TARGET	REALISASI	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS dan KUPA PPAS APBD Tahun Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Penetapan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Dokumen Penyelesaian APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERGUB Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Data Rencana Aksi Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia	100%	100%	100%
Output (%)				100%

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, seperti pada tahun sebelumnya, dari lima dokumen yang ditargetkan, juga tercapai realisasi sebanyak lima dokumen, yang berarti pencapaian *output* mencapai 100%.

Tabel 18. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)	Klasifikasi
2021	100	47,66	210,68	Tidak Efisien
2022	100	70,83	141,19	Tidak Efisien

Sumber : Diolah penulis Berdasarkan teori Mahmudi *Value for Money*

Berdasarkan Tabel 18 dan hasil perhitungan tingkat efisiensi yang disesuaikan dengan klasifikasi pengukuran efisiensi Mahmudi (2019), maka tingkat efisiensi pada tahun 2021 adalah Tidak Efisien, sebesar 210,68%. Begitu pun pada tahun 2022 juga menurut klasifikasi Tidak efisien, meskipun begitu tahun 2022 terjadi penurunan dengan hasil perhitungan efisiensi sebesar 141,19%. Tingkat efisiensi suatu kegiatan dilihat dari persentase perhitungannya, di mana semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerjanya. Rasio efisiensi yang sangat besar pada tahun 2021 menunjukkan potensi ketidakseimbangan antara *output* dan *input*. Menurut (Mahmudi, 2019) untuk meningkatkan efisiensi pada tahun 2021, salah satunya dapat mengevaluasi kembali penggunaan sumber daya sesuai alokasinya.

Meskipun realisasi *output*-nya sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 bisa dinilai kinerja efisiensinya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021, karena rasio efisiensinya lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2022, pemanfaatan sumber daya atau serapan anggaran yang dimiliki lebih optimal untuk menghasilkan *output* yang sama. Oleh karena itu, BPKD Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses koordinasi dan pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Analisis Efisiensi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pengukuran efisiensi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung perbandingan persentase nilai dari data capaian fisik, yang merupakan laporan dan *draft* peraturan pembinaan pengelolaan keuangan daerah (*Output*), dan persentase keuangan kegiatan (*Input*) dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian dikalikan dengan 100%. *Output* dalam hal ini disampaikan oleh Staf Pembinaan BLUD sebagai informan 4.

Tabel 19. Rencana dan Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2021		Realisasi Fisik (%)
		TARGET	REALISASI	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.	3 Draft Peraturan	3 Draft Peraturan	100%
	Laporan peningkatan kapabilitas SKPD/UKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengimplementasikan peraturan bidang keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Output (%)				100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa dari sub kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, terdapat 2 aktivitas yang menghasilkan *output* berupa 3 *draft* peraturan dan 3 laporan kapabilitas SKPD/UKPD yang terealisasi 100%.

Tabel 20. Rencana dan Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

SUB KEGIATAN	DATA FISIK	2022		REALISASI FISIK
		TARGET	REALISASI	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.	1 Peraturan	1 Peraturan	100%
	Laporan peningkatan kapabilitas SKPD/UKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengimplementasikan peraturan bidang keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka implementasi peraturan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Output (%)				100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa pada tahun 2022, jumlah *output* yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2021. Dari sub kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, dihasilkan *output* berupa 1 peraturan dan 1 laporan. Kemudian, dalam rangka menyempurnakan peraturan terkait implementasi BLUD, terdapat sub kegiatan tambahan yaitu Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang menghasilkan *output* berupa laporan terkait kapabilitas implementasi peraturan BLUD yang terealisasi 100%. Hal ini disampaikan informan 4.

Tabel 21. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)	Klasifikasi
2021	100	31	321,43	Tidak Efisien
2022	100	100	100	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 21 dan hasil perhitungan tingkat efisiensi yang disesuaikan dengan klasifikasi pengukuran efisiensi yang telah ditentukan oleh (Mahmudi, 2019), maka tingkat efisiensi pada tahun 2021 adalah Tidak Efisien dengan persentase 321%. Sedangkan pada tahun 2022 adalah Kurang Efisien mengalami penurunan dengan hasil perhitungan efisiensi sebesar 100%.

Jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun 2021 berasal dari 1 sub kegiatan, yaitu Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2022, *output* yang dihasilkan berasal dari 2 sub kegiatan, yaitu Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah dan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota, yang semuanya terealisasi 100%.

Tingkat efisiensi tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, karena anggaran yang direncanakan tidak terserap secara maksimal untuk menghasilkan *output*. Sementara itu, tahun 2022 anggaran terserap secara maksimal 100% dalam menghasilkan *output* dan dinilai lebih baik kinerja efisiensinya dengan klasifikasi yaitu Kurang Efisien.

Efektivitas

Menurut (Mahmudi, 2019) efektivitas merupakan tingkat keberhasilan proses, dengan membandingkan antara hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengukuran rasio efektivitas memerlukan data capaian kinerja dari indikator kinerja program berdasarkan Perubahan RPJMD tahun 2017 -2022. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif pada proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Berikut adalah formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Keterangan

Outcome : Realisasi Indikator Kinerja Program

Angka *outcome* yang dimaksud merupakan realisasi kinerja dari program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Output : Persentase Realisasi Fisik

Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Setelah didapatkan nilai dari perhitungan menggunakan rumus efektivitas, maka hasil dari perhitungan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
≥ 100%	Efektif
85% - 99%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Salah satu perwujudan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 dan 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran. Berdasarkan data tersebut, Indikator Kinerja Sasaran, salah satunya adalah Opini BPK atas audit Laporan Keuangan. Pencapaian target WTP tersebut didukung oleh dua indikator program yang dilaksanakan oleh BPKD.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota berada pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah. indikator program yang hendak dicapai :

1. Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD

Penyelesaian Tahapan RAPBD sesuai Batas Waktu Ketentuan. RAPBD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 telah diselesaikan pada tanggal 29 November 2022 sesuai dengan batas waktu ketentuan yang terdapat pada Permendagri 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga capaian indikator tersebut 100%. Hal ini disampaikan informan 1.

2. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021 (*Unaudited*) disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022, sesuai batas waktu ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat 3 yg berbunyi "Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir." Hal ini disampaikan dengan informan 2.

Berdasarkan kedua indikator program tersebut dapat dilihat persentase capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 22. Perhitungan Efektivitas Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Outcome (%)
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu.	100%	100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 22, terlihat bahwa capaian *outcome* tahun 2021 melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kedua indikator program mencapai 100% tercapai.

Tabel 23. Perhitungan Efektivitas Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Outcome (%)
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu.	100%	100%

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 23, terlihat bahwa capaian *outcome* tahun 2022 melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa kedua indikator program 100% tercapai.

Tabel 24. Klasifikasi Perhitungan Efektivitas Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2022

Kegiatan	Tahun	Outcome (%)	Output (%)	Efektifitas (%)	Klasifikasi
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2021	100	85,71	116,67	Efektif
	2022	100	100	100	Efektif
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2021	100	100	100	Efektif
	2022	100	100	100	Efektif
	2021	100	100	100	Efektif

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2022	100	100	100	Efektif
---------------------------------------------------------------	------	-----	-----	-----	---------

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 24, hasil perhitungan rasio efektivitas kegiatan pada tahun 2021 adalah 100%, dengan kategori Efektif. Namun, pada salah satu kegiatan, yaitu Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, mencapai 116,67% karena Laporan Evaluasi Penyelenggara Fasilitas Pembayaran Pendapatan Daerah tidak terlaksana pada tahun tersebut, sehingga tidak terealisasi. Meskipun demikian, kegiatan tetap dikategorikan efektif. Sementara pada tahun 2022, seluruh *output* kegiatan memiliki rasio 100%. Menurut kategorisasi efektivitas oleh (Mahmudi, 2019), ini menunjukkan bahwa kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai efektivitas penuh dalam kegiatan pada tahun tersebut.

Outcome dalam pengukuran ini adalah pencapaian pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Program pengelolaan keuangan daerah terdiri dari dua indikator program yang bertujuan untuk mencapai Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021 dan 2022 mencapai target WTP. Hal ini disampaikan oleh informan 2.

Masing-masing *output* yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ini meliputi jumlah laporan penyelesaian pengelolaan perbendaharaan daerah, penyelesaian penyusunan rencana anggaran daerah, dan jumlah laporan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2021 dan 2022, *output* mencapai 100%. Namun, kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah pada tahun 2021 tidak mencapai target sehingga hanya mencapai 85,71% dengan rasio efektivitas meningkat menjadi 116%.

Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria efektif, namun belum memenuhi teori efektivitas menurut pengukuran *value for money*. Menurut (Mahmudi, 2019) cakupan *outcome* tidak hanya dilihat dari persentase hasil, melainkan juga mengukur nilai kualitas dari *output*. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu kegiatan tidak hanya tergantung pada seberapa besar *output* mencapai target, tetapi juga seberapa besar kontribusi kualitas *output* tersebut terhadap pencapaian tujuan akhir (*outcome*) yang dalam hal ini adalah kesesuaian dengan indikator program. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Program dan Keuangan sebagai informan 3.

Meskipun *output* mencapai 100%, jika tujuan akhir tidak tercapai secara penuh, efektivitasnya tetap rendah. Namun, jika *output* yang dihasilkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan akhir, efektivitasnya dapat meningkat meskipun *output* tidak mencapai target secara penuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran berbasis *value for money* pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam *value for money* dengan rata - rata klasifikasi tahun 2021 dan 2022 adalah Ekonomis, Tidak Efisien dan Efektif. Berikut ini adalah kesimpulan dari ketiga dimensi yang diukur merujuk berdasarkan teori (Mahmudi, 2019) :

1. Ekonomis

Pada tahun 2021 tingkat ekonomis hasil rata - rata ketiga kegiatan adalah Ekonomis dengan rata - rata persentase perhitungan 226,23%. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 115,53% menunjukkan sedikit penurunan nilai ekonomis pada tahun. Perbandingan dari tahun 2021-2022 yang menghasilkan bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki nilai yang lebih ekonomis dari tahun berikutnya. Dengan demikian, tahun 2021 dinilai lebih ekonomis dalam penggunaan anggaran karena penggunaan anggaran yang lebih hemat, sementara tahun 2022 menunjukkan peningkatan serapan anggaran meskipun masih terdapat pemborosan pada beberapa kegiatan.

2. Efisiensi

Pada tahun 2021, hasil rata-rata efisiensi dari ketiga kegiatan adalah 219,25%, menunjukkan tingkat efisiensi yang tidak efisien. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai efisiensi menjadi 115,53%, dengan klasifikasi juga sebagai tidak efisien. Tingkat efisiensi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 karena anggaran yang direncanakan tidak terserap secara maksimal untuk menghasilkan *output*. Di sisi lain, serapan anggaran tahun 2022 meningkat dalam menghasilkan *output* dan dinilai lebih baik dibandingkan rasio efisiensi tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh ketidakrealisasian salah satu *output* yaitu Laporan Evaluasi Penyelenggara Fasilitas Pembayaran Pendapatan Daerah secara penuh pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah tahun 2021, sehingga sumber daya yang digunakan untuk mencapai *output* tidak dimanfaatkan secara optimal.

3. Efektivitas

Pada tahun 2021, hasil rata - rata efektivitas dari ketiga kegiatan adalah 106% . Kemudian tahun 2022 mengalami penurunan rasio efektivitas menjadi 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja tahun 2022 terealisasi sesuai indikator dari program yang di rencanakan, karena *output* tersebut berkontribusi sepenuhnya terhadap pencapaian *outcome*. Sebaliknya, pada tahun 2021, meskipun *output* lebih rendah dari target, berdasarkan

perhitungan dan klasifikasi efektivitasnya lebih dari 100% karena *output* tersebut secara sistematis masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian *outcome*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *output* tidak mencapai secara penuh, kontribusinya masih signifikan terhadap pencapaian *outcome* yang mencapai 100%. Dengan demikian, efektivitas tahun 2021 lebih dari 100%, menunjukkan bahwa *output* tersebut masih memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan, meskipun keluaran / hasil dari suatu kegiatan tidak terealisasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti C, H. (2023). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan Menggunakan Metode Value For Money pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II*. Universitas Medan Area.
- Ardila, I., & Putri, A. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol.15 No.1.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Saat, Ed.; Cet.7). Erlangga.
- Christina, E. (2001). *Anggaran Perusahaan : Suatu Pendekatan Praktis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber daya Manusia : Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi* (Cet.1). Alfabeta.
- Fitriah, N. K. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan pada Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep Value For Money*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ihwan, R., & Rahman, A. (2016). *Analisis Proses Penetapan Indikator Kinerja pada Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mangkunegara, A. A. A. Prabu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, Ed.; Edisi 1). Andi.
- Mulyadi. (2011). *Auditing Buku 1* (Salemba Em).

- Nadra Suhaila Lubis. (2021). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi Sektor Publik edisi 2* (Edisi 2, p. 158). Salemba Empat.
- Pratiwi, D. (2020). *Pengukuran Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan Menggunakan Metode Value for Money*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purwiyanti, D. (2017). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Jurnal Katalogis, Vol.5 Nomor 3, 190–200.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Edisi 3, p. 199). Mitra Wacana Media.
- Sari, M. A. R. (2021). *Kinerja Anggaran pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019*. Universitas Sriwijaya.
- Siregar, B. (2015). *Akutansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* . UPP-STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sujarweni, W. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru.
- Supriyono. (2002). *Akuntansi Manajemen I : Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan*. BPFE.
- Supriyono. (2011). *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok* (Buku 1 Edi, p. 344). BPFE.